

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

ISSN 1412-9507

Dialektika antara Filsafat dan Agama dalam Pemikiran
Filsafat Islam: Kesenambungan dan Interaksi
Wardani

Masyarakat Islam Ideal dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam
Andik Wahyun Muqoyyidin

Konflik Kelas dan Fenomena Komunisme dalam Hubungan
Struktural Menurut Pandangan Karl Marx
Ahmad Syadzali

Ustadz Selebriti Abdullah Gymnastiar
(Perspektif Hipersemiotika Yasraf Amir Piliang)
Maskur

Pembaruan Islam di Kalimantan Selatan Pada Awal Abad Ke-20
Rahmadi

Deskripsi Kitab Senjata Mukmin Dan Risalah Doa
M. Adriani Yulizar dan Hamidi Ilhami

Peta Gerakan Syi'ah di Kalimantan Selatan
Humaidy

AL-BANJARI	Vol. 13	Halaman 1-115	No.1	Banjarmasin, Januari - Juni 2014	ISSN 1412-9507
------------	---------	------------------	------	-------------------------------------	-------------------

AL - BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2014

DAFTAR ISI

Dialektika antara Filsafat dan Agama dalam Pemikiran Filsafat Islam: Kesenambungan dan Interaksi Wardani	1-12
Masyarakat Islam Ideal dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam Andik Wahyun Muqoyyidin	13-25
Konflik Kelas dan Fenomena Komunisme dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx Ahmad Syadzali	26-36
Ustadz Selebriti Abdullah Gymnastiar (Perspektif Hipersemiotika Yasraf Amir Piliang) Maskur	37-48
Pembaruan Islam di Kalimantan Selatan Pada Awal Abad Ke-20 Rahmadi	49-65
Deskripsi Kitab Senjata Mukmin Dan Risalah Doa M. Adriani Yulizar dan Hamidi Ilhami	66-94
Peta Gerakan Syi'ah di Kalimantan Selatan Humaidy	95-115

MASYARAKAT ISLAM IDEAL DALAM KONSEPSI FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Andik Wahyun Muqoyyidin

Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang.

E-mail: andikwahyun_m@yahoo.com

Abstract

The essence of society is an integral part of the discussion of the philosophy of Islamic education. Fazlur Rahman even conclude that the primary purpose of the Qur’an is to enforce a social order that’s fair and ideal. As a community order which emphasizes tolerance, democracy and civilized, civil society to contribute positively to the needs of Muslims today. For the basic concept of philosophy of Islamic education should be placed in the context of civil society supra-system of education in which it will be applied. Therefore reconstruction of Islamic educational philosophy into something very urgent and relevant to today’s problems of Islamic education.

Kata kunci: Masyarakat Islam ideal, masyarakat madani, rekonstruksi, filsafat pendidikan Islam

Pendahuluan

Salah satu tugas dari filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arah bagi tercapainya tujuan pendidikan Islam.¹ Secara rasional-filosofis, pendidikan Islam adalah bertujuan untuk membentuk *al-insân al-kamîl* atau manusia paripurna. Beranjak dari konsep ini, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu: *pertama*, dimensi dialektika horizontal, *kedua*, dimensi ketundukan vertikal. Pada dimensi dialektika horizontal pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkrit yang terkait dengan diri, sesama manusia dan alam semesta. Untuk itu akumulasi berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap mental merupakan bekal utama dalam hubungannya dengan pemahaman tentang kehidupan konkrit tersebut. Sedangkan pada dimensi kedua, pendidikan sains dan teknologi, selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara dan melestarikan sumber daya alam, juga hendaknya menjadi jembatan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan Sang Pencipta.²

¹ Nuryanti, “Filsafat Pendidikan Islam tentang Kurikulum”, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 5, No. 3 (Desember 2008), h. 330.

² Lihat A.M. Saefuddin, et al, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 126 serta Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 79.

Untuk itulah secara umum tujuan pendidikan Islam diarahkan pada dua dimensi di atas, yakni sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh pendidikan Islam dalam kaitannya dengan pembentukan *al-insân al-kamil*.³ Dalam hal orientasi, pendidikan Islam seharusnya tidak sekedar membentuk kesalehan individual semata, atau kesadaran mistik dalam perspektif Muhammad Iqbal, namun harus membentuk kesalehan sosial juga.⁴ Sebagaimana disinyalir Iqbal pada awal abad ke-20 dan hingga sekarang masih terasa, umat Islam di dunia Timur cenderung mengedepankan kesadaran mistik dan kesalehan individual yang diibaratkan dengan larut dalam tasbih, yang penting selamat di akhirat, sementara problem sekitar tidak begitu dipikirkan.⁵ Untuk itu, menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Samsuddin orientasi pendidikan harus diarahkan untuk dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari perubahan.⁶

Dalam konteks periode perkembangan masyarakat dunia saat ini, Abuddin Nata menyatakan bahwa kehidupan manusia saat ini telah memasuki kepada masyarakat informasi (*informatical society*) sebagai kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern.⁷ Jika masyarakat modern memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi ke depan, bersikap terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inovatif, maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belumlah cukup. Pada masyarakat informasi, manusia selain harus memiliki ciri-ciri masyarakat modern pada umumnya, juga harus memiliki ciri-ciri lain, yaitu menguasai dan mampu mendayagunakan arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar (serba ingin tahu), mampu menjelaskan, bersifat imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.⁸

Pembahasan tentang hakikat masyarakat memiliki signifikansinya ketika pendidikan mencoba memformulasikan konstruksi masyarakat ideal yang dicita-citakan. Formulasi masyarakat ideal ini merupakan salah satu tujuan pendidikan. Karena itu, hakikat masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan filsafat pendidikan Islam. Kerangka-kerangka normatif dan teoritis tentang masyarakat ini menjadi bahan bagi pengembangan masyarakat ke depan yang diupayakan oleh pendidikan Islam melalui kajian filsafat pendidikan Islam.⁹

³ Nuryamin, "Hakikat Evaluasi: Perspektif Filsafat Pendidikan Islam", *Lentera Pendidikan*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2011), h. 213.

⁴ Samsuddin, "Format Baru Transformasi Pendidikan Islam", *ISLAMICA*, Vol. 7, No. 1 (September 2012), h. 170.

⁵ KG. Saiyidain, *Percikan Filsafat Iqbal Mengenai Pendidikan*, (Bandung: Diponegoro, 1981), h. 51.

⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 57.

⁷ Asnawan, "Pendidikan Islam dan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Falasifa*, Vol. 1, No. 2 (September 2010), h. 96.

⁸ Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 81.

⁹ A. Heris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 67.

Dari konsep itu, maka lahirilah idealitas terwujudnya masyarakat Islam ideal yang kerap disebut *masyarakat madani*, yang kadang disamakan dengan istilah masyarakat sipil (*civil society*).¹⁰ Yakni masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem yang transparan.¹¹

Ada dua alasan pokok mengapa konsep pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak. *Pertama*, konsep dan praktik pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani. *Kedua*, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat serta bangsa Indonesia di segala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam.¹²

Anatomi Masyarakat Islam Ideal

Dalam al-Qur'an telah diberikan pandangan-pandangan umum tentang masyarakat yang hendak dibentuk oleh kaum muslimin, mengenai bentuk, model dan tatanan masyarakat itu sendiri sepenuhnya merupakan kreasi manusia untuk merumuskan agar sesuai dengan perkembangan peradabannya, kreasi itu sendiri

¹⁰ Namun satu hal menarik untuk diamati adalah adanya perbedaan antara dua kelompok Muslim di Indonesia dalam memberikan pemaknaan terhadap konsep *civil society*. Kalangan tradisional menerjemahkan *civil society* dengan istilah "masyarakat sipil". Sementara kalangan modernis menerjemahkannya dengan istilah "masyarakat madani". Kedua istilah tersebut sama-sama mendekati fungsi *civil society* sebagai prasyarat demokratisasi. Akan tetapi, dalam kaitan dengan posisi negara, fungsi kedua istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. Untuk mewujudkan demokrasi, kalangan tradisional pernah menempatkan negara sebagai "musuh" atau setidaknya sebagai entitas yang harus dilawan oleh "masyarakat sipil", karena negaralah yang paling mungkin melakukan regimentasi dan penindasan terhadap rakyat. Sementara kalangan modernis memandang negara secara positif, tidak sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang dapat diajak bersama-sama menumbuhkan "masyarakat madani", sehingga demokrasi bisa dibangun bersama-sama. Pilihan kalangan modernis atas istilah "masyarakat madani" secara tegas memberikan warna lain dan sekaligus memuat pemaknaan yang berbeda terhadap konsep *civil society*. Lihat Andik Wahyu Muqoyyidin, *Civil Society dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LINTANG Rasi Aksara Books, 2013), h. 34-35.

¹¹ Sri Herwindya Baskara Wijaya, "Media Literacy dan Pemberdayaan Masyarakat Madani", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2012), h. 3.

¹² Siswanto, "Reorientasi Pendidikan Islam (Memperkokoh Wacana Masyarakat Madani)", *Tadrís*, Vol. 5, No. 1 (2010), h. 154.

didasarkan kepada interpretasi terhadap konsep-konsep dasar mengenai masyarakat dalam al-Qur'an. Dalam upaya mengaktualkan konsep-konsep yang terdapat dalam al-Qur'an itu, setiap individu dan kelompok memiliki cara sendiri untuk melakukan penafsiran terhadap makna teks. Peluang untuk munculnya tafsir yang berbeda sangat terbuka, mengingat struktur masyarakat yang heterogen dan latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, politik, budaya dan adat kebiasaan dari mereka yang menafsirkan teks itu. Meski demikian, menurut Iqbal, Islam mengutamakan upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Islam, dan karena itu mengharapkan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jauh lebih penting daripada suatu angan-angan yang ideal tentang konstruksi masyarakat masa depan. Islam tidak menghalangi nalar intelektual umat untuk memikirkan tentang konsep masyarakat yang tepat untuk masa dan waktu yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.¹³

Sebagai wahyu yang diturunkan dalam konteks kesejarahan selama kurang lebih dua puluh dua tahun, proses dialogis telah terjadi antara wahyu al-Qur'an dan kebutuhan kesejarahan manusia ketika itu. Oleh karena itu, idiom-idiom yang diperkenalkan oleh al-Qur'an seperti *hudan li an-nâs* (Qs. al-Baqarah, 2/87: 185) dan *kuntum khayr ummah* (Qs. Ali 'Imran, 3/89: 110) dan idiom-idiom lain yang sangat terkesan "antropologis" sebenarnya tertuju pada manusia secara kolektif (masyarakat).¹⁴ Karena tekanan antropologis pesan-pesan al-Qur'an tersebut, Fazlur Rahman sebagaimana dikutip Tolchah menyimpulkan bahwa tujuan utama al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan ideal. Begitu signifikannya persoalan-persoalan ini, kesalahan individual seperti tergambar dalam konsep-konsep takwa dan pemurah sebagai *elan* dasar pembentukan pribadi hanya memiliki arti dalam sebuah konteks sosial.¹⁵

Penempatan al-Qur'an pada posisi sentral dalam kajian Islam tentang sosial kemasyarakatan sesuai dengan sifat dialogis nilai yang dikandungnya itu dengan realitas sosial menjadi signifikan karena al-Qur'an berbicara tentang masyarakat dalam pelbagai aspek, semisal dorongan perubahan sosial yang positif dan hukum sejarah yang berkaitan dengan bangun-runtuhnya masyarakat. Bagian konseptual sebagai *ideal-type* al-Qur'an yang berisi konsep-konsep sosial, antara lain, diungkapkan dengan bahasa al-Qur'an, semisal *ummat(an) wasath(an)* (Qs. al-Baqarah [2/87]: 143) dan *ummat(an) muslimat(an) lak* (Qs. al-Baqarah [2/87]: 128).¹⁶

¹³ Lihat Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 516.

¹⁴ Moch. Tolchah, "Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an", *El-Tajdid*, Vol. 1, No. 1 (2007), h. 1.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), h. 54.

¹⁶ Tolchah, "Masyarakat Ideal...", h. 2.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Khishais al-Amanah li al-Islam* menjelaskan pengertian *wasath(an)* sama dengan *tarwazzun* yaitu keseimbangan, antara dua arah atau jelas yang saling berhadapan atau bertentangan, tidak terpengaruh oleh kepentingan individu, kelompok, ras dan suku, *ummat(an) wasath(an)* adalah umat yang adil, toleran, senang berdialog, mau hidup rukun serta tidak bersifat ekstrim yang dapat memicu konflik.¹⁷ *Ummat(an) wasath(an)* merupakan representasi dari ajaran Islam yang menekankan umatnya menjadi umat “pertengahan” atau “moderat”. Islam tidak memberikan satu garis pun mengenai kekerasan dan tindakan yang radikal dalam menyiarkan Islam.¹⁸

Walaupun Islam mengajarkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang baik harus bermula dengan menciptakan manusia yang baik, sebab individu itulah yang merupakan unit terkecil dari masyarakat, namun masyarakat menurut pandangan Islam berbeda dengan masyarakat menurut pandangan Barat. Dalam pandangan sosiologi modern yang ada adalah perjanjian sosial (*la contract social*). Sedang dalam pandangan Islam yang ada adalah perjanjian perseorangan (*la contract individual*) antara tiap manusia dengan Tuhan.¹⁹

Dalam sejarah, Islam pada awal mulanya telah mampu menciptakan peradaban dunia dengan penekanan pada kemampuan masyarakatnya menjadi masyarakat yang tunduk dan taat kepada Allah. Masyarakat ideal senantiasa menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan dan beriman kepada Allah. Inilah yang menurut Kuntowijoyo sebagai proses humanisasi, liberasi (pembebasan) dan transendensi yang menjadi ciri atau persyaratan untuk menjadi yang unggul.²⁰

Sementara itu, menurut Tolchah pergulatan wacana keilmuan sepanjang sejarah manusia menunjukkan bahwa ide tentang masyarakat yang ideal merupakan wacana yang perennial. Kita bisa menarik akar historisnya sejak Plato (428-348 SM) dalam *The Republic*, Aristoteles (384-322 SM) dalam *Politics*. Gelombang Hellenisme ke dunia Islam menjadikan warisan klasik Yunani tersebut menjadi bagian historis bangunan pemikiran filsuf Islam, seperti pengaruh yang begitu kentara Plato atas ide al-Farabi tentang masyarakat utama (*al-madinat al-fadhilah*), termasuk justifikasinya melalui teori emanasi.²¹ Ide tentang masyarakat secara lebih ekstensif dikemukakan

¹⁷ Hermawan, *Filsafat Pendidikan...*, h. 63.

¹⁸ Muqoyyidin, *Civil Society...*, h. 128.

¹⁹ Hermawan, *Filsafat Pendidikan...*, h. 63.

²⁰ Lihat Kuntowijoyo, dalam Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES & LSAF, 1999), h. 119.

²¹ Seorang pemikir muslim abad pertengahan, biasa dikenal sebagai filsuf muslim yakni al-Farabi mengemukakan gagasan mengenai *al-madinat al-fadhilah* (masyarakat utama), menurutnya *al-madinat al-fadhilah* adalah sebuah masyarakat atau negara yang mewujudkan segala keutamaan di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah masyarakat sebelum mencapai *al-madinat al-fadhilah*, ia terlebih dahulu melalui proses dari tahap masyarakat nomaden dan primitif, kemudian memasuki tahap peralihan dan akhirnya mencapai tahap kematangan yang menekankan pada kualitas masyarakat yang mendukung ide negara ideal. Konsep al-Farabi mengenai masyarakat atau negara utama lebih menekankan pada substansi tentang susunan masyarakat daripada ketentuan legal-formal yang berakar pada hukum fiqh kekhalifahan

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya.²² Dalam perkembangan wacana sosial dan politik di Indonesia, polemik berkepanjangan tentang *civil society* yang sesungguhnya muncul dalam konteks sosio-kultural di Barat diusung untuk diterapkan di Indonesia dengan penuh keyakinan oleh eksponennya semisal Nurcholish Madjid dan M. Dawam Rahardjo. Tidak hanya pemaksaan penerapannya dalam konteks Indonesia memaksa mereka untuk mensejajarkan antara *civil society* dengan masyarakat madani,²³ sebagaimana dianut beberapa cendekiawan muslim, atau semangat apoloogia yang tinggi dengan *al-madinat al-fadhilah*. Ide-ide tersebut, tentu saja, mesti dipahami lahir dari filosofi dan konteks sosio-historis yang berbeda.²⁴

Mencermati Dua Wajah Kontradiktif Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan istilah yang populer digunakan untuk menjelaskan *civil society* ‘versi’ Islam, terutama berkaitan dengan pengaturan aspek kemasyarakatan dalam Islam. Terminologi masyarakat madani merupakan terjemahan dari ‘*mujtama’ madani*’ (bahasa Arab), yang diperkenalkan oleh Prof.

(kenegaraan) seperti yang dikembangkan oleh al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan an-Nabhani. Gagasan al-Farabi lebih berdimensi kemasyarakatan daripada teori hukum mengenai kekuasaan yang bernama negara. Penekanan al-Farabi pada substansi sebagai wujud ideal dari sebuah masyarakat yang hendak dibangun yaitu kota yang beradab. Lihat Jurdi, *Pemikiran Politik...*, h. 517.

²² Pokok pikirannya yang terpenting adalah teori sejarah masyarakat manusia sebagai proses tak berujung (*unlimited process*), berputar dan mengulang terus-menerus itulah yang oleh ilmuwan menyebutnya dengan teori Lingkaran atau teori Siklus Ibnu Khaldun. Teori ini dibangun berdasarkan penelitiannya pada rangkaian proses sejarah masyarakat sosial-politik di benua Afrika yaitu sekitar Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Dan secara praktis Ibnu Khaldun ikut terlibat dalam proses sejarah tersebut. Dalam studinya, Ibnu Khaldun memfokuskan perhatian pada perbedaan esensial dalam organisasi sosial di antara masyarakat pastoral yang berpindah-pindah (nomaden) dan masyarakat yang menetap. Di sini konsep ‘*ashabiyah*’, yang sering diterjemahkan sebagai “solidaritas kelompok”, “sentimen kelompok” atau “kohesi sosial”, memainkan peran sentral. Tesis utamanya adalah kelompok-kelompok dengan ‘*ashabiyah* yang kuat akan dapat mengungguli dan mendominasi kelompok-kelompok dengan ‘*ashabiyah* yang lemah. Lihat Samsinas, “Ibnu Khaldun: Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial”, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6, No. 3 (Desember 2009), h. 334., serta Ihsan Ali-Fauzi, “Ibn Khaldun dan Ilmu-Ilmu Sosial: Tentang ‘*Ashabiyah*, Negara, “Sakralisasi” Ilmu”, dalam <http://www.paramadina-pusad.or.id/ibn-khaldun-dan-ilmu-ilmu-sosial-tentang-ashabiyah-negara-sakralisasi-ilmu.html#> diakses tanggal 24 Februari 2014.

²³ Perbedaan lain antara *civil society* dan masyarakat madani adalah *civil society* merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif, misalnya, mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Lihat A. Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan*, (Yogyakarta: PSAP, 2004), h. 84.

²⁴ Tolchah, “Masyarakat Ideal...”, h. 3.

Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia.²⁵ Menurutna secara definitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.

Terjemahan makna masyarakat madani ini, banyak diikuti oleh para cendekiawan dan ilmuwan di Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, Azyumardi Azra dan sebagainya. Dan pada prinsipnya konsep masyarakat madani (*civil society*) adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban. Di sisi lain masyarakat madani mensyaratkan adanya toleransi dan menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).

Namun sebagaimana diakui Bob S. Hadiwinata bahwa tidak sedikit pengamat politik yang “kecolongan” dengan mengagung-agungkan *civil society* sebagai sebuah kekuatan yang dapat menyulap sistem politik dalam sekejap menjadi demokrasi dan juga sekaligus harapan bagi demokrasi untuk berfungsi secara optimal. Mereka mulai membayangkan bahwa tanpa *civil society* yang hidup (*vibrant civil society*) maka demokrasi pun tidak akan hidup.²⁶

Hal itu dapat kita lihat dari pengalaman beberapa negara Afrika yang masuk ke dalam kategori “*failed state*” (negara yang gagal) seperti Liberia, Sierra Leone, Kongo, dan bahkan Nigeria menunjukkan bahwa berbagai kelompok milisi dan preman (yang berkolaborasi dengan para politisi) menjadi bagian dari instrumen politik yang mengintimidasi lawan melalui cara-cara kekerasan (penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan). Demokrasi menjadi suatu ajang aktivitas politik yang sangat mengerikan. Begitu pun, itu terlihat juga dari munculnya beberapa kelompok pasca-Komunis di Eropa Tengah dan Timur serta pengalaman negara-negara demokrasi baru di Asia seperti Filipina, Thailand dan termasuk Indonesia sendiri.

Senada dengan itu Sidney Jones, dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) di Universitas Paramadina beberapa waktu lalu menyampaikan di Indonesia, kita tidak bisa bicara masyarakat madani tanpa memasukkan kelompok-kelompok Islam yang mendukung formalisasi syariat Islam dan berniat menggantikan sistem demokrasi dengan pemerintahan Islam. Tujuannya bisa sangat sempit dan diskriminatif; doktrinnya bisa eksklusif, dan untuk beberapa, taktiknya bisa termasuk penggunaan kekerasan. Kunci untuk mempertimbangkan kelompok-kelompok ini sebagai masyarakat madani adalah apakah mereka melihat diri mereka sebagai jembatan antara warganegara dan negara, dan sebagian besar memang begitu.²⁷

²⁵ Wawan Mas’udi, “Masyarakat Madani: Visi Etis Islam Tentang *Civil Society*”, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (November 1999), h. 167.

²⁶ Bob Sugeng Hadiwinata, “*Civil Society*: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 1 (Juli 2005), h. 2.

²⁷ Sidney Jones, “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran”, dalam <http://www.paramadina-pusad.or.id/sisi-gelap-reformasi-di-indonesia-munculnya-kelompok-masyarakat-madani-intoleran.html> diakses tanggal 25 Februari 2014.

Dengan jelas, dia menyebutkan tiga jenis kelompok garis-keras yang berkembang di Indonesia yang demokratis sebagai representasi dari masyarakat madani intoleran: *pertama*, kelompok main hakim sendiri, dan FPI adalah yang paling terkenal dalam kategori ini; *kedua*, kelompok advokasi di tingkat akar-rumput, bisa diwakili oleh GARIS di Cianjur yang juga kerap menggunakan taktik kekerasan; dan *ketiga*, kelompok transformatif yang diwakili oleh Hizbut Tahrir, yang ingin menggantikan sistem demokratik di Indonesia dengan khilafah.²⁸

Berangkat dari fakta tersebut, kita bisa cermati bagaimana karakter masyarakat madani dengan dua wajahnya yang saling bertolak belakang (kontradiktif). Sebagai asosiasi sosial yang menjunjung nilai otonomi, kesukarelaan, persamaan hak, dan *civility* (kepatuhan terhadap hukum dan aturan main), *civil society* dapat dikatakan sebagai jaringan sosial yang menjembatani antara pemerintah dengan rakyat sehingga memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi. Dalam konteks ini, kita berbicara tentang “*good civil society*”. Di lain pihak, sebagai asosiasi sosial yang mengedepankan hegemoni kelompok di atas kelompok lain dan perebutan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, *civil society* menampilkan wajah yang buruk dan berpotensi untuk menghancurkan demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, kita berbicara tentang “*bad civil society*”.²⁹ Dalam hemat penulis dengan mencermati lebih lanjut hal ini, maka kita akan terhindar dari sakralisasi terhadap konsep *civil society* karena disamping mempunyai keyakinan terhadap potensi *civil society*; kita pun akan menyadari pula sisi-sisi keterbatasan *civil society* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani

Konsep dasar filsafat dan teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan. Apabila terlepas dari konteks masyarakat madani, maka pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat tersebut (masyarakat madani). Jadi, kebutuhan umat yang amat mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan meningkatkan kualitas manusia Muslim menuju masyarakat madani. Untuk itu umat Islam di Indonesia dipersiapkan dan harus dibebaskan dari ketidaktahuannya (*ignorance*) akan kedudukan dan peranannya dalam kehidupan masyarakat madani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Permasalahan lain yang sangat mendasar adalah terkait dengan filsafat pendidikan Islam yang sebagaimana diketahui masih dianggap sebagai sebuah disiplin pengetahuan yang menjadi mata kuliah dengan tidak mempunyai kontribusi dalam membangun sebuah konsep dan teori serta operasionalisasi pendidikan. Hal ini terlihat amat jarang sekali, bahkan mungkin hampir tidak ada sebuah buku atau

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugeng Hadiwinata, “*Civil Society...*”, h. 11.

³⁰ Siswanto, “Reorientasi Pendidikan Islam...”, h. 155.

tulisan dalam bentuk lain yang membahas masalah peranan filsafat pendidikan dan khususnya filsafat pendidikan Islam dalam pengembangan pendidikan.³¹

Muhaimin dalam Muqoyyidin,³² mengatakan bahwa untuk memahami ke mana arah pengembangan filsafat pendidikan Islam di Indonesia, ada dua masalah pokok yang mesti dikaji, yaitu: (1) seperti apa tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan (2) bagaimana konstruksi pemikiran filsafat pendidikan Islam yang perlu dikembangkan di Indonesia, dalam kerangka memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendidikan nasional tak terkecuali penguatan dan pemberdayaan masyarakat madani itu sendiri.

Disertasi Muhaimin berjudul “Filsafat Pendidikan Islam Indonesia: Suatu Kajian Tipologis”, menyimpulkan tipologi pemikiran pendidikan Islam yang ada sekarang dapat dikelompokkan menjadi lima macam: (1) perenial-esensialis *salafi*, (2) perenial-esensialis madzhabi, (3) modernis, (4) perenial-esensialis kontekstual-verifikatif, dan (5) rekonstruksi sosial. Muhaimin dalam Mahmud Arif,³³ menganalisis pemikiran pendidikan Islam yang berkembang sekarang sebagian besar dinilai kurang kritis, cenderung tekstual-lughawi, dan sekadar sebagai *syarh* (eksplanasi) dari pemikiran Islam masa silam sehingga nuansa reproduksinya sangat kental. Oleh karena itu dalam hemat penulis, upaya untuk merekonstruksi filsafat pendidikan Islam adalah sesuatu yang sangat urgen dan relevan dengan problematika pendidikan Islam dewasa ini.

Rekonstruksi filsafat pendidikan Islam dimaksudkan sebagai usaha merajut kembali konsep filsafat pendidikan Islam dengan melihat pandangan-pandangan terhadap objek formal filsafat pendidikan Islam makro maupun mikro, dengan berdasar pandangan terhadap tiga entitas (pandangan terhadap Tuhan, manusia dan alam), kemudian diperoleh sebuah filsafat pendidikan Islam yang menjadi dasar dalam membangun teori dan praktik pendidikan yang humanis.³⁴

Suyanto dan Djihad Hisyam dalam Siswanto,³⁵ mengungkapkan perihal pendidikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan bangsa hendaknya dibangun atas paradigma pendidikan, yang dapat memberikan rekonstruksi terhadap arah pendidikan dalam usaha meletakkan dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius, inovatif, kompetitif, taat hukum, menghargai pluralisme, hak-hak asasi manusia, serta mengembangkan tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi lingkungan global.

³¹ Abd. Haris, “Rehumanisasi Pendidikan: Arah Baru Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam”, *Pidato Pengukuban Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam LAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 12 Pebruari 2008), h. 2.

³² Andik Wahyu Muqoyyidin, “Tipologi Pemikiran Modernis Pendidikan Islam”, *Jurnal el-Hikmah*, Vol. IX, No. 1 (Juni 2011), h. 290.

³³ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 14.

³⁴ Abd. Haris, “Rehumanisasi Pendidikan...”, h. 18.

³⁵ Siswanto, “Reorientasi Pendidikan Islam...”, h. 150.

Sejalan dengan pandangan di atas, formulasi konsep pendidikan Islam yang fungsional dan ditopang dengan sandaran nilai yang menjangkau idealisasi pendidikan Islam yang berkarakter di masa depan mau tidak mau harus menempatkan filsafat sebagai *entry point* dan paradigma dasar bagi seluruh bangunan keilmuannya.³⁶

Rekonstruksi filsafat pendidikan Islam dalam rangka menuju masyarakat madani Indonesia harus diorientasikan kepada penguatan pandangan-pandangan kemanusiaan, baik dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Abd. Haris dengan mengutip Suhartono,³⁷ mengungkapkan bahwa ontologi pendidikan Islam menekankan pada masalah “pemanusiaan manusia”. Lebih lanjut, persoalan pendidikan yang pokok menurutnya adalah bagaimana menumbuhkembangkan potensi yang terkandung di dalam diri manusia secara berkelanjutan. Seyyed Hossein Nasr dalam Hilmy,³⁸ bahkan menegaskan semestinya, pendidikan Islam harus dimaknai sebagai proses berkesinambungan untuk mengembangkan bukan saja potensi akal budi anak didik, tetapi potensi-potensi lainnya menuju profil manusia seutuhnya yang dalam nomenklatur klasik sering digambarkan sebagai *insan kamil*, pribadi paripurna.

Sementara itu, epistemologi pendidikan Islam lebih melihat dan mempersoalkan objek, metode serta sistem penyelenggaraan pendidikan Islam, serta pengetahuan tentang kebenaran pendidikan Islam itu sendiri. Objek formal pendidikan Islam adalah manusia dari segi pengembangan potensi intelektualnya, bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal, sehingga menjadi cerdas dalam keahliannya (*competent*) dan juga menjadi seorang yang terampil (*skillfull*). Berbekal kecerdasan dan keterampilannya itu diharapkan seseorang dapat menggerakkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.³⁹

Suhartono dalam Abd. Haris,⁴⁰ menegaskan aspek aksiologis (etika) pendidikan adalah menumbuhkembangkan nilai-nilai kebaikan dalam berperilaku sehingga bisa menjadi matang menuju pada kedewasaan sebagai konkretisasi dari kecerdasan emosional yang tinggi. Maka berlandaskan aspek aksiologis tersebut, rekonstruksi filsafat pendidikan Islam harus diorientasikan kepada penanaman akhlak mulia melalui *tazkiyah al-nafs*, yaitu suatu upaya untuk menginternalisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang berpusat pada penyucian jiwa.⁴¹

³⁶ Suripto, “Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Islam”, *Jurnal Al-Furqan*, Vol. II, No. 1 (Maret-Agustus 2013), h. 1.

³⁷ Abd. Haris, “Rehumanisasi Pendidikan...”, h. 12.

³⁸ Masdar Hilmy, “Nomenklatur Baru Pendidikan Islam di Era Industrialisasi”, *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 1 (April 2012), h. 10.

³⁹ Abd. Haris, “Rehumanisasi Pendidikan...”, h. 13.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mohammad Muchlis Solichin, “*Tazkiyah al-Nafs* sebagai Ruh Rekonstruksi Sistem Pendidikan Islam”, *Tadrīs*, Vol. 4, No. 1 (2009), h. 33.

Hal itu kemudian harus diselaraskan dengan rumusan tujuan pendidikan Islam yang lebih bersifat antisipatif, menyentuh aspek aplikatifnya dan dapat menyentuh juga kebutuhan masyarakat atau pengguna lulusan. Artinya, pendidikan Islam harus berupaya membangun manusia dan masyarakat yang utuh dan menyeluruh (*insan kamil*) dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan berperadaban yang tercermin dalam kehidupan manusia bertakwa dan beriman, berdemokrasi dan merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan beramal saleh, berkepribadian dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan kompetitif dan kooperatif dalam era global dan berpikir global dalam rangka memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁴²

Simpulan

Kerangka-kerangka normatif dan teoritis tentang masyarakat Islam ideal seyogyanya menjadi bahan bagi pengembangan masyarakat ke depan yang diupayakan pendidikan Islam melalui kajian filsafat pendidikan Islam. Meski pergulatan wacana keilmuan sepanjang sejarah manusia menunjukkan bahwa ide tentang masyarakat ideal merupakan wacana yang perennial, hal tersebut mesti dipahami lahir dari filosofi dan konteks sosio-historis yang berbeda.

Konsepsi masyarakat madani (*civil society*) harus dicermati dengan segenap potensi sekaligus keterbatasannya. Hal ini penting di dalam kerangka memformulasikan teori sekaligus operasionalisasi pendidikan Islam yang tepat dan relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat tersebut. Karenanya upaya rekonstruksi filsafat pendidikan Islam dengan lebih mengorientasikan penguatan pandangan-pandangan kemanusiaan baik dari dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya, merupakan keniscayaan yang mesti menjadi *concern* utama para pemerhati dan praktisi pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

- Ali-Fauzi, Ihsan, "Ibn Khaldun dan Ilmu-Ilmu Sosial: Tentang 'Ashabiyah, Negara, "Sakralisasi" Ilmu", dalam <http://www.paramadina-pusad.or.id/ibn-khaldun-dan-ilmu-ilmu-sosial-tentang-ashabiyah-negara-sakralisasi-ilmu.html#> diakses tanggal 24 Februari 2014.
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Asnawan, "Pendidikan Islam dan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Falasifa*, Vol. 1, No. 2 (September 2010): 96
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- Haris, Abd, "Rehumanisasi Pendidikan: Arah Baru Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 12 Pebruari 2008.

⁴² Siswanto, "Reorientasi Pendidikan Islam...", h. 158.

- Hermawan, A. Heris, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.
- Hilmy, Masdar, "Nomenklatur Baru Pendidikan Islam di Era Industrialisasi", *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 1 (April 2012): 10
- Jones, Sidney, "Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran", dalam <http://www.paramadina-pusad.or.id/sisi-gelap-reformasi-di-indonesia-munculnya-kelompok-masyarakat-madani-intoleran.html> diakses tanggal 25 Februari 2014.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Kiblafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kuntowijoyo, dalam Rahardjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES & LSAF, 1999.
- Maarif, A. Syafii, *Mencari Autentisitas Dalam Kegalaan*. Yogyakarta: PSAP, 2004.
- Mas'udi, Wawan, "Masyarakat Madani: Visi Etis Islam Tentang *Civil Society*", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (November 1999): 167
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, *Civil Society dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LINTANG Rasi Aksara Books, 2013.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, "Tipologi Pemikiran Modernis Pendidikan Islam", *Jurnal el-Hikmah*, Vol. IX, No. 1 (Juni 2011): 290
- Nata, Abuddin, *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Nuryamin, "Hakikat Evaluasi: Perspektif Filsafat Pendidikan Islam", *Lentera Pendidikan*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2011): 213
- Nuryanti, "Filsafat Pendidikan Islam tentang Kurikulum", *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 5, No. 3 (Desember 2008): 330
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, terjemah Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Saefuddin, A.M. et al, *Dsekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Saiyidain, KG, *Percikan Filsafat Iqbal Mengenai Pendidikan*. Bandung: Diponegoro, 1981.
- Samsinas, "Ibnu Khaldun: Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial", *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6, No. 3 (Desember 2009): 334
- Samsuddin, "Format Baru Transformasi Pendidikan Islam", *ISLAMICA*, Vol. 7, No. 1 (September 2012): 170
- Siswanto, "Reorientasi Pendidikan Islam (Memperkokoh Wacana Masyarakat Madani)", *Tadrís*, Vol. 5, No. 1 (2010): 150-155

- Solichin, Mohammad Muchlis, “*Tazkiyah al-Nafs* sebagai Ruh Rekonstruksi Sistem Pendidikan Islam”, *Tadrís*, Vol. 4, No. 1 (2009): 33
- Suripto, “Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Islam”, *Jurnal Al-Furqan*, Vol. II, No. 1 (Maret-Agustus 2013): 1
- Tolchah, Moch., “Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an”, *El-Tajdid*, Vol. 1, No. 1 (2007): 1
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara, “*Media Literacy* dan Pemberdayaan Masyarakat Madani”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2012): 3